

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : Sekretariat DPRD
TAHUN ANGGARAN : 2026

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / (Indikator/Tujuan)	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SUB KEGIATAN : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan TUJUAN : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan mengintegrasikan perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang profesional, efektif, akuntabel, dan responsif gender.	Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, jumlah ASN sebanyak 217 orang yang terdiri dari ASN laki-laki sebanyak 127 orang atau sebesar 58,53% dan ASN perempuan sebanyak 90 orang atau sebesar 41,47%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ASN laki-laki dan perempuan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan Gubernur Kaltim No. 463/K.532/2018 tentang Juknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan PPRG Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Jumlah kebijakan (Perda Kalimantan Timur terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan bidang politik, ekonomi)	Akses : Belum seluruh ASN laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) karena keterbatasan kuota peserta dan penyesuaian kebutuhan organisasi. Partisipasi : Partisipasi ASN laki-laki dan perempuan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan pemahaman terkait implementasi peraturan perundang-undangan yang responsif gender masih belum optimal karena adanya pembagian tugas dan beban kerja masing-masing pegawai. Kontrol : Kesempatan ASN dalam memperoleh pengembangan kompetensi terkait implementasi peraturan perundang-undangan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) masih bergantung pada penugasan pimpinan dan kebutuhan organisasi sehingga belum seluruh ASN dapat menentukan pengembangan kapasitas secara mandiri. Manfaat : Hasil peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang responsif gender belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh ASN laki-laki maupun perempuan.	Belum optimalnya perencanaan pengembangan kompetensi ASN yang mengintegrasikan perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pemberian kesempatan mengikuti kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Belum meratanya kesempatan ASN laki-laki dan perempuan dalam mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait implementasi peraturan perundang-undangan dan PPRG karena penyesuaian kebutuhan organisasi dan tugas kedinasan. Masih terbatasnya pemahaman ASN mengenai pengintegrasian perspektif gender dalam pelaksanaan tugas dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.	Adanya pembagian tugas dan beban kerja yang berbeda antara ASN laki-laki dan perempuan sehingga mempengaruhi kesempatan mengikuti kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan kuota peserta menyebabkan belum seluruh ASN dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Perubahan regulasi dan dinamika kebutuhan organisasi menuntut ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan PUG dan PPRG.	Meningkatkan kapasitas ASN laki-laki dan perempuan melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang responsif gender. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Mewujudkan kesempatan yang setara bagi ASN laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses terhadap kegiatan pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang responsif gender.	Meningkatkan pemahaman ASN mengenai implementasi peraturan perundang-undangan yang responsif gender melalui kegiatan bimbingan teknis dan penguatan kapasitas aparatur. Masukan : Rp. 153,368,000 Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Hasil : Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah	Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, jumlah ASN sebanyak 217 orang yang terdiri dari ASN laki-laki sebanyak 127 orang atau sebesar 58,53% dan ASN perempuan sebanyak 90 orang atau sebesar 41,47%. Data ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa keterlibatan ASN laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan cukup berimbang sehingga diperlukan kesempatan yang setara dalam pengembangan kapasitas aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Masih diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman ASN laki-laki maupun perempuan terkait implementasi peraturan perundang-undangan yang responsif gender guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara profesional, efektif, akuntabel, serta mendukung pelaksanaan PUG dan PPRG di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan Gubernur Kaltim No. 463/K.532/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan PPRG pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Output : Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 75% ASN Sekretariat DPRD Prov. Kaltim sudah memahami implementasi dari PUG dan PPRG) Outcome : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Meningkatnya jumlah ASN di lingkungan Sekretariat DPRD yang memahami PPRG. Meningkatnya jumlah dan kualitas kebijakan pengarusutamaan gender) Indikator Kinerja : 75% persen ASN Sekretariat DPRD sudah memahami PPRG

Samarinda, 15 Juni 2026

Plt. Sekretaris DPRD

Hardianto, S.E

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197101171990101001